

ABSTRAK

Pada perkembangan negara Indonesia, dengan berjalannya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan didalam batang tubuh atau Pasal-pasal nya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam penjelasan umum, yang menyangkut pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum dan bukan sebagai negara kekuasaan belaka, hukum membawa konsekuensi besar bagi kehidupan bangsa, baru setelah perubahan UUD 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 ayat. 1 Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang mana dalam penanggulangan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan hukum yang terkait, dalam proses berjalannya hukum, menurun dan meningkatnya kejahatan menunjukan efektivitas kinerja sistem peradilan pidana. Maka dari itu berkembang pula pola pikiran manusia, akan tetapi hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mana perilaku manusia semakin kedepan semakin menyimpang pula perbuatannya tanpa diimbangi dengan pola pikiran yang positif serta pedoman dalam beragama yang kuat. perkembangan anak dan lingkungannya agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. SUS-ANAK/2022/PN/DPS 1 1 Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sesuai putusan pengadilan NOMOR 19/PID.SUS-ANAK/2022/PN/DPS 2 Bagaimana pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan menurut undang-undang no 19/PID. Memberikan kontribusi dalam akademik khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Kadiri tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, hanya dikenai upaya diversi yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak, serta pelatihan kerja dalam lembaga pemasyarakatan kepada anak dibawah umur. 5.2 Saran 1 Hendaknya keluarga menciptakan suasana yang harmonis didalam memberikan pendidikan moral, karena hal tersebut membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku. Hakim seharusnya memperhatikan dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa yang semuanya masih anak-anak yaitu bukan semata-mata untuk pembalasan namun sebagai pendidikan dan membuat efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta bersifat pendidikan yang menunjukan pada masyarakat terutama anak-anak agar ke depannya tidak terjerumus untuk melakukan tindakan tersebut.

Kata Kunci: Sanksi pidana pembunuhan oleh anak

ABSTRACT

In the development of the Indonesian state, with the enactment of the 1945 Constitution before the changes in the body or its articles, the term rule of law was not found, but in general explanations, those concerning the Indonesian government were based on law and not as a mere state power, law brought major consequences. for the life of the nation, only after the amendment to the 1945 Constitution was expressly mentioned in Article 1 paragraph. 1 Indonesia is a rule-of-law country where in handling crimes that occur in Indonesia by using related laws, in the process of implementing the law, decreasing and increasing crimes shows the effectiveness of the performance of the criminal justice system. Therefore, the pattern of human thinking also develops, but this raises concerns that human behavior will increasingly deviate in the future without being balanced with positive thought patterns and strong religious guidelines. development of children and their environment in order to avoid unwanted events. SUS-ANAK/2022/PN/DPS 1 1 What are the judges' considerations in imposing a crime on the criminal act of murder committed by a child according to court decision NUMBER 19/PID.SUS-ANAK/2022/PN/DPS 2 How to set sanctions against children who commit the crime of murder according to Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. To find out the setting of sanctions for children who commit criminal acts of murder according to law no. 19/PID. Contribute academically, especially at the Faculty of Law, Kadiri University regarding legal protection of children as perpetrators of criminal acts of murder committed by minors Article 3 letter f of Law Number 11 of 2012 states that every child in a criminal justice process has the right not to be sentenced to death or life imprisonment, only subject to diversion efforts aimed at achieving peace between victims and children, resolving cases outside the judicial process, preventing children from being deprived of liberty, encouraging the community to participate and instilling a sense of responsibility towards children, as well as job training in correctional institutions for children under age. 5.2 Suggestion 1 The family should create a harmonious atmosphere in providing moral education, because this forms the character or character of the child in behaving. Judges should pay attention in imposing crimes on defendants who are all still children, namely not solely for retaliation but as education and create a deterrent effect for defendants so they do not repeat their actions, as well as educational in nature which shows society, especially children, so that in the future not fall for this action.

Keywords: Criminal sanctions for murder by children